

JURNAL PENELITIAN UNIVERSITAS JAMBI

SERI HUMANIORA

Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2012

Daftar Isi

Analisa <i>Directness Level</i> Penyampaian Keluhan dan Saran pada Kolom Opini Surat Kabar Melati	01 - 08
Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran dengan Pengawasan APBD Yuliusman	09 - 18
Pengaruh Teknologi Sistem Informasi Baru terhadap Kinerja Individu Nela Safelia, Susfayetti dan Rita Friyani	19 - 24
Model Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan pada Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Suandi, Yusma Damayanti dan Yulismi	25 - 34
Impor <i>New Process Scraps and Wastes of Natural Latex Condoms</i> Ditinjau dari Perspektif <i>Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal</i> Rahayu Repindowaty Harahap	35 - 46
Fungsi Pemerintahan dalam rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty	47 - 56
Pengembangan Pendekatan Kontekstual terhadap Hasil Belajar Renang Gaya Dada Muhammad Ali	57 - 68
Pengaruh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Citra Penyelenggara Layanan Publik Erida, Ade Octavia dan Yenny Yuniarti	69 - 76
Pedoman Penulisan	

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN ANGGOTA DPRD TENTANG
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN APBD
(Survey Terhadap Anggota DPRD Provinsi Jambi)**

Yuliusman

*Fakultas Ekonomi Universitas Jambi
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat Jambi*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran mempengaruhi peranan dewan dalam melakukan pengawasan APBD, serta apakah dengan adanya Partisipasi Masyarakat, hubungan antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD semakin meningkat. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dan untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi berganda (*moderated regression analysis (MRA)*). Survey dilakukan terhadap 38 anggota dari 45 Anggota DPRD Provinsi Jambi. Hasil penelitian adalah (1) Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD. (2) Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD. (3) Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan Partisipasi Masyarakat serta interaksinya secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

Kata kunci : *partisipasi masyarakat, pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan pengawasan APBD*

PENDAHULUAN

Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu : 1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini fungsi anggota DPRD yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran. Permasalahannya adalah apakah pelaksanaan fungsi pengawasan lebih disebabkan oleh kualitas SDM dan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran ataukah lebih disebabkan oleh permasalahan lain. Disamping itu, apakah Partisipasi Masyarakat akan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran yang akan dilakukan oleh anggota DPRD.

Hal yang sangat kritis pada tahap perencanaan anggaran tersebut adalah perlunya penguatan pada sisi pengawasan,

karena anggaran dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat tersebut. DPRD merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan APBD, sebagaimana tertuang dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang jumlah APBD nya relatif rendah dibandingkan daerah tetangganya terutama Riau dan Sumatera Selatan, namun mengalami peningkatan jumlah cukup baik dari tahun-ketahun, yang tentunya harus diimbangi dengan pengawasan yang baik terhadap APBD tersebut.

Hasil pemeriksaan atas LKD TA 2004 Provinsi Jambi, yang dilakukan oleh BPK, terdapat tujuh kabupaten, dan satu kota di wilayah Provinsi Jambi, memuat opini “*Wajar*

Dengan Pengecualian (WDP)”. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa jumlah penggunaan anggaran yang diindikasikan merugikan negara masing-masing Provinsi Jambi sebesar 7,83 miliar, Kota Jambi sebesar 9,01 miliar, Tanjung Jabung Timur sebesar 6,69 miliar, Muaro Jambi sebesar 28,42 miliar, Sarolangun 6,71 miliar, Tebo sebesar 807,10 juta, Tanjung Jabung Barat sebesar 1,54 miliar, Batanghari sebesar 14,17 miliar, dan Kabupaten Bungo sebesar 844,35 juta (sumber laporan BPK RI Perwakilan Jambi, TA 2004)

Dari Fenomena ini jelaslah bahwa peran DPRD dalam pengawasan APBD sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan APBD dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peranan DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif. Hal ini berakibat program kerja yang ada dalam anggaran daerah belum sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah. Program kerja tersebut cenderung merupakan arahan dari pemerintah atasan, yaitu pemerintah pusat dan/atau pemda Provinsi

Pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota DPRD dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh anggota DPRD, diantaranya adalah kualitas SDM dan pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap terhadap fungsi pengawasan oleh anggota DPRD yang berpengaruh secara tidak langsung pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD, diantaranya adalah Partisipasi Masyarakat.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Andriani (2002) meneliti pengaruh pengetahuan dan *Rules, Procedures, and Policies (RPPs)* terhadap peranan DPRD dalam pengawasan APBD. Hasil

penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap peranan DPRD dalam pengawasan APBD. Sementara B.Yudono (2002) juga menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai.

Berdasarkan survey pendahuluan yang penulis lakukan diketahui bahwa dari total 45 orang anggota DPRD Provinsi Jambi, 14 orang (32%) berlatar belakang pendidikan SMU/SMK, 0 orang (0,00%) berlatar belakang pendidikan D3, 27 orang (60%) S1 dan 4 orang (8%) S2. Masih tingginya persentase anggota DPRD yang berpendidikan hanya memenuhi standar minimal (SMU/SMK), menjadi menarik untuk diteliti kemampuannya dalam pengawasan APBD, karena menurut penelitian Murni dan Witono (2003), strata pendidikan adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengawasan APBD.

Berdasarkan latar belakang di atas dan penelitian terdahulu maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran dengan Pengawasan APBD” (Survey Terhadap Anggota DPRD Provinsi Jambi).

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, pengawasan APBD dan partisipasi masyarakat. Definisi dari masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Pengetahuan Anggota DPRD tentang anggaran adalah kemampuan anggota DPRD dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran.

Pengawasan APBD adalah pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD). Partisipasi Masyarakat adalah persepsi responden tentang adanya keterbukaan mengenai anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat.

Defenisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan pengawasan APBD, dengan instrumen pengukuran berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Variabel Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran (X_1) dibagi dalam dua dimensi yaitu: Pengetahuan tentang cara penyusunan APBD dan Pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan APBD. Dimensi kemudian diukur dengan menggunakan indikator sepuluh pertanyaan yang dikembangkan oleh Sopanah (2003) dan S.Werimon (2007). Jawaban dari setiap instrumen menggunakan skala *Likert* dengan gradasi 5 tingkatan dari sangat positif sampai sangat negatif. Jawaban diberi skor 5 untuk sangat setuju, skor 4 untuk setuju, skor 3 untuk tidak tahu, skor 2 untuk tidak setuju dan skor 1 untuk sangat tidak setuju. Skor tertinggi menunjukkan tingginya pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran (APBD).

Variabel Partisipasi Masyarakat (X_3) dibagi dalam dua dimensi yaitu: Partisipasi pada tahap perencanaan dan Partisipasi pada tahap pelaksanaan. Dimensi kemudian diukur dengan menggunakan indikator sepuluh pertanyaan yang dikembangkan oleh Shende dan Bennet (2004) dan S.Werimon (2007). Jawaban dari setiap instrumen menggunakan skala *Likert* dengan gradasi 5 tingkatan dari sangat positif sampai sangat negatif. Jawaban diberi skor 5 untuk sangat setuju, skor 4 untuk setuju, skor 3 untuk tidak tahu, skor 2 untuk tidak setuju dan skor 1 untuk sangat tidak setuju. Skor tertinggi menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat.

Pengawasan APBD(Y)

Variabel Pengawasan APBD (Y) dibagi dalam tiga dimensi yaitu: Digukannya hak-hak DPRD pada saat penyusunan APBD dan digukannya hak-hak DPRD pada saat pelaksanaan APBD serta digukannya hak-hak DPRD pada saat pertanggungjawaban APBD. Dimensi kemudian diukur dengan menggunakan indikator duapuluh empat pertanyaan yang dikembangkan dari Murni & Witono,(2003). Jawaban dari setiap instrumen menggunakan skala *Likert* dengan gradasi 5 tingkatan dari sangat positif sampai sangat negatif. Jawaban diberi skor 5 untuk sangat setuju, skor 4 untuk setuju, skor 3 untuk tidak tahu, skor 2 untuk tidak setuju dan skor 1 untuk sangat tidak setuju. Skor tertinggi menunjukkan baiknya pengawasan DPRD terhadap APBD.

Populasi dan Prosedur Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2009-2014 yaitu sebanyak 45 Orang. Penelitian ini bersifat sensus dimana semua populasi dijadikan sampel. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu : Penelitian Lapangan, yang diperoleh dari jawaban responden melalui penyebaran kuesioner kepada anggota DPRD Provinsi Jambi; dan Penelitian Kepustakaan.

Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

Untuk menguji kualitas data yang akan diolah dilakukan itu diperlukan dua macam pengujian yaitu uji keshahihan (*test of validity*) dan uji keandalan (*test of reliability*). Disamping itu, karena data yang diolah menggunakan alat analisis regresi yang hanya dapat diolah jika menggunakan skala metrik (interval atau rasio). Oleh karena itu variabel-variabel yang menggunakan skala ordinal terlebih dahulu dikonversikan ke skala interval melalui metode interval berurutan (*method of successive interval*).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan variabel moderasi (*Moderated Regression Analysis*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Analisis tersebut dapat digunakan untuk melihat pengaruh moderasi

suatu variabel terhadap hubungan variabel independen lainnya dengan variabel dependen, dengan model analisis sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 * X_2 + \dots \dots (2)$$

Dimana:

- Y : Pengawasan APBD
- X₁ : Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran
- X₂ : Partisipasi Masyarakat
- β₀ : Konstanta
- β₁... β₃ : Koefisien Regresi
- X₁*X₂ : Interaksi antara pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dan Partisipasi masyarakat
- : *Error term*

Teknik untuk menguji regresi dengan variabel moderator atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) dilakukan dengan cara uji interaksi. Ini merupakan aplikasi khusus model regresi linear berganda di mana dalam persamaannya mengandung interaksi perkalian dua atau lebih variabel independen seperti yang terlihat dalam persamaan (2).

Variabel kombinasi perkalian X₁ dan X₂, merupakan variabel moderator oleh karena itu menggambarkan pengaruh moderating variabel X₂, terhadap hubungan X₁ dan Y. Sedangkan variabel X₁, X₂ merupakan pengaruh langsung dari variabel X₁, X₂ terhadap Y. Variabel moderating dapat dijelaskan dengan cara membuat persamaan derivasi (turunan) X₁ atau dY/dX₁ dari persamaan (2). Hasil persamaan derivasinya adalah:

$$dY/dX_1 = \beta_1 + \beta_3 X_2 \dots \dots \dots (3)$$

Persamaan ini memberikan makna bahwa dY/dX₁ merupakan fungsi dari X₂ dan X₃, serta interaksinya memoderasi hubungan antara X₁ dan Y. Jika variabel X₂, dan X₃ serta interaksinya merupakan *moderating variabel*, maka koefisien regresi variabel tersebut harus signifikan pada 0,05 atau 0,10. Efek moderator yang signifikan atau tidak, didasarkan pada peningkatan R² yang signifikan pada persamaan tersebut. Fokus utama yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah signifikansi indeks koefisien dan sifat

pengaruh interaksi variabel moderator akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

Model regresi berganda yang digunakan dalam pengujian hipotesis harus terhindar dari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi-asumsi klasik statistik. Dengan demikian *estimator* OLS (*Ordinary Least Square*) dapat memenuhi harapan yaitu sebagai *estimator* yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Proses pengujian asumsi klasik statistik dilakukan bersama-sama dengan proses uji regresi sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik statistik menggunakan media kotak kerja yang sama dengan uji regresi dalam SPSS. Dengan demikian, dalam penelitian ini asumsi model regresi yang akan diuji adalah pengujian *disturbance error* (normalitas), heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, hipotesis statistik untuk pengaruh parsial yang akan diuji adalah sebagai berikut :

Untuk hipotesis pertama :

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_1 : \beta_i > 0$$

i: 1

Untuk Hipotesis kedua dan ketiga

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0$$

i: 2,3,.....

untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik uji t dengan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{S_{\beta_i}}$$

Dimana:

β_i : koefisien regresi variabel independen ke-i

S_{β_i} : *standard error* dari variabel independen ke-i

Selanjutnya membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} pada tingkat keyakinan 95% (α = 0,05), dengan kriteria keputusan:

- Jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$: H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- Jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$: H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Penerimaan hipotesis alternatif (H_1) mengindikasikan bahwa variabel yang diuji berpengaruh terhadap variabel dependent.

Pengujian secara simultan

Berdasarkan hipotesis penelitian tentang pengaruh variabel-variabel bebas dalam penelitian tersebut secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut.

- H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$
- H_1 : Sekurang-kurangnya ada satu koefisien regresi (β_i) $\neq 0$

Untuk menguji hipotesis tersebut maka dilakukan pengujian dengan menggunakan statistik uji F.

Pengujian Koefisien determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{JK_R}{JK_Y}$$

dimana :

- JK_R : jumlah kuadrat regresi (*explained sum of square*)
- JK_Y : jumlah total kuadrat (*total sum of square*)

Nilai R^2 berada antara 0 dan 1. Semakin mendekati nilai 1 atau 100%, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk menguji kualitas data penelitian yang diperoleh melalui kuesioner penelitian terlebih dahulu dilakukan analisis validitas dan reliabilitas dari data yang diperoleh. Validitas data penelitian diuji menggunakan pendekatan analisis korelasi skor butir pertanyaan kuesioner tiap variabel dengan total skor variabel. Nilai reliabilitas dilihat menggunakan metoda *Alpha Cronbach*.

Kuesioner penelitian Variabel Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_1) terdiri

atas 10 item pertanyaan. Hasil perhitungan korelasi untuk skor setiap butir pernyataan dengan total skor Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_1) lebih dari 0.3. Dilihat dari nilai korelasi yang diperoleh seluruh item (indikator) variabel X_1 dapat disimpulkan bahwa semua item adalah valid.

Kuesioner penelitian Variabel Partisipasi masyarakat (X_2) terdiri atas 14 item pertanyaan. Hasil perhitungan korelasi untuk skor setiap butir pernyataan dengan total skor Partisipasi masyarakat (X_2) lebih dari 0.3. Dilihat dari nilai korelasi yang diperoleh seluruh item (indikator) variabel X_2 dapat disimpulkan bahwa semua item adalah valid.

Kuesioner penelitian Variabel Pengawasan APBD (Y) terdiri atas 24 item pertanyaan. Hasil perhitungan korelasi untuk skor setiap butir pernyataan dg total skor Pengawasan APBD (Y) lebih dari 0.3. Dilihat dari nilai korelasi yg diperoleh seluruh item (indikator) variabel Y dapat disimpulkan bahwa semua item adalah valid.

Hasil reliabilitas yang diperoleh untuk instrumen variabel X_1 sebesar 0,773, untuk X_2 sebesar 0,877, dan untuk Y sebesar 0,920, sehingga seluruh item kuesioner untuk masing masing variabel tersebut diatas memiliki nilai koefisien reliabilitas lebih besar dari nilai batas reliabilitas = 0,6 sebagai batas minimal (Ghozali, 2005). Dengan kata lain, intrumen penelitian Variabel X dan Y andal berdasarkan kriteria koefisien reliabilitas yang ditetapkan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan variabel moderasi (*Moderated Regression Analysis*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Analisis tersebut dapat digunakan untuk melihat pengaruh moderasi suatu variabel terhadap hubungan variabel independen lainnya dengan variabel dependen, dengan model analisis sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 * X_2 + \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

Y : Pengawasan APBD

X_1 : Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran

X_2 : Partisipasi masyarakat

Data yang digunakan sebagai variabel bebas (X) adalah rata-rata skor untuk variabel Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_1), Partisipasi Masyarakat (X_2) sedangkan variabel Pengawasan keuangan daerah sebagai variabel tak bebas (Y). Data penelitian untuk keempat variabel yang diteliti dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala ukur ordinal.

Untuk memenuhi syarat data yang digunakan dalam perhitungan statistik parametrik adalah sekurang-kurangnya mempunyai skala pengukuran interval, data yang dikumpulkan dari kuisisioner terlebih dahulu ditransformasikan menjadi skala interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI). Hasil data interval dapat dilihat pada lampiran. Menggunakan data dengan skala ukur interval yang diperoleh selanjutnya dihitung rata-rata skor untuk setiap variabel yang digunakan dalam analisis data.

Hasil perhitungan koefisien regresi berdasarkan data penelitian yang diperoleh dapat ditulis dalam persamaan regresi taksiran sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 0,069 + 0,977X_1$$

Hasil ini memberikan gambaran bahwa penilaian yang menjadi responden memperlihatkan adanya hubungan yang linear positif dari Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap Pengawasan APBD, yang berarti semakin baik Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran akan meningkatkan Pengawasan keuangan daerah.

Dapat dijelaskan bahwa variabel Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_1) memiliki koefisien regresi positif, berarti jika variabel Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_1) meningkat sebesar satu satuan maka skor Pengawasan APBD (Y) akan mengalami kenaikan sebesar nilai koefisien regresinya yaitu sebesar 0,977 pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan).

Hasil perhitungan koefisien regresi berdasarkan data penelitian yang diperoleh dapat ditulis dalam persamaan regresi taksiran sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 4,504 - 0,646X_1 - 0,295 X_2 + 0,210 X_1X_2 +$$

Hasil ini memberikan gambaran bahwa penilaian yang menjadi responden memperlihatkan adanya pengaruh yang linear positif dari Partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan Pengawasan APBD, yang berarti semakin tinggi Partisipasi masyarakat akan memperkuat hubungan antara Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan Pengawasan APBD.

Dapat dijelaskan bahwa interaksi Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_1) dengan partisipasi Masyarakat (X_2) memiliki koefisien regresi positif, berarti semakin besar interaksi Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_1) dengan Partisipasi masyarakat (X_2) maka skor Pengawasan APBD (Y) akan naik sebesar nilai koefisien regresinya yaitu sebesar 0,210 pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan).

Persamaan regresi linear yang diperoleh melalui metode penaksiran OLS (*Ordinary Least Squares*) dapat dikatakan baik untuk menggambarkan hubungan fungsional sekelompok variabel bebas terhadap variabel tak bebas jika persamaan tersebut memenuhi asumsi-asumsi regresi klasik. Asumsi regresi yang dilihat adalah asumsi error mengikuti distribusi normal, asumsi bebas kolinearitas dan asumsi tidak terdapat heterokedastisitas. Uji normalitas dalam Penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*.

Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa nilai residual dari model perdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas (sig.) *Kolmogorov-Smirnov Test* yang diperoleh sebesar 0,833 lebih besar dari 0,05.

Hasil perhitungan nilai VIF untuk variabel bebas dalam model regresi dalam penelitian ini menunjukkan angka yang lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi

kolinearitas yang tinggi antara variabel bebas dalam persamaan regresi yang diperoleh.

Berdasarkan output pengujian dapat disimpulkan bahwa residual (error) yang muncul dalam persamaan regresi mempunyai varians yang sama (homoskedastisitas) karena hasil pengujian untuk semua regresi variabel bebas dengan harga mutlak dari residual (error) tidak signifikan yang ditunjukkan oleh p-value (sig) lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Pengujian Hipotesis

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-hitung untuk variabel bebas Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran sebesar 15,900 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,000. Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H_0) dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya.

Nilai tabel $t_{student}$ dengan $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas = $38 - 1 - 1 = 36$ untuk pengujian satu sisi adalah 1,688. Kriteria pengujian satu sisi (positif) adalah “tolak H_0 jika t-hitung > t-tabel. Karena nilai t-hitung untuk variabel bebas Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran sebesar 15,900 lebih besar dari nilai t-tabel = 1,688 atau jika dilihat nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kekeliruan 5% ($\alpha = 0,05$), maka dapat diambil keputusan untuk menolak H_0 . Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh positif yang nyata (bermakna) dari variabel Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap Pengawasan APBD.

Untuk menguji apakah variabel Partisipasi masyarakat merupakan variabel yang memoderating pengaruh Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap Pengawasan keuangan dilakukan pengujian terhadap variabel interaksi $X_1.X_2$.

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-hitung untuk variabel interaksi $X_1.X_2$ sebesar 2,240 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,032. Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H_0) dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya.

Nilai tabel $t_{student}$ dengan $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas = $38 - 3 - 1 = 34$ untuk

pengujian dua sisi adalah 2,032. Kriteria pengujian adalah “tolak H_0 jika t-hitung > t-tabel. Karena nilai t-hitung > t-tabel untuk interaksi $X_1.X_2$ (interaksi Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan Partisipasi masyarakat) sebesar 2,240 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2,032 atau jika dilihat nilai signifikansi 0,032 lebih kecil dari tingkat kekeliruan 5% ($\alpha = 0,05$), maka diambil keputusan untuk tidak menolak H_0 . Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% tidak terdapat pengaruh yang nyata (bermakna) dari variabel interaksi Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengawasan APBD.

Untuk menguji hipotesis ini maka dilakukan pengujian dengan menggunakan statistik uji F. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai F-hitung 169,312 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,000. Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H_0) dapat dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya.

Nilai tabel F dengan $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas = $38 - 3 - 1 = 34$ untuk pengujian dua sisi adalah 2,88. Kriteria pengujian satu sisi adalah “tolak H_0 jika F-hitung > F-tabel. Karena nilai F-hitung sebesar 169,312 lebih besar dari nilai F-tabel = 2,88 atau jika dilihat nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kekeliruan 5% ($\alpha = 0,05$), maka dapat diambil keputusan untuk menolak H_0 . Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh simultan yang nyata (bermakna) dari variabel Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat serta interaksinya terhadap Terhadap Pengawasan APBD.

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dapat dilihat dari koefisien determinasi. Nilai R-square atau R^2 pada kolom ketiga pada tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_1), Partisipasi masyarakat (X_2) serta variabel interaksi terhadap Pengawasan APBD (Y) adalah sebesar 0,937 atau 93,7%.

Ini berarti bahwa 9,37% perubahan Pengawasan APBD dapat dijelaskan (ditentukan) oleh Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran yang dimoderasi oleh variabel Partisipasi masyarakat. Sedangkan 6,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diamati oleh peneliti.

Jadi dapat dikatakan bahwa Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, yang dimoderasi oleh Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama turut menentukan Pengawasan APBD.

Pembahasan

Analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan di atas, merupakan upaya untuk memecahkan masalah pokok yang diidentifikasi dalam penelitian ini ditinjau dari pendekatan statistik. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk menginterpretasikan hasil-hasil perhitungan statistik ke dalam bentuk deskripsi mengenai masalah yang diteliti.

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama dapat dilihat bahwa Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,000 ($< 0,05$). Atau dengan kata lain semakin tinggi Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis kedua dapat dilihat interaksi antara Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,032 lebih besar dari $= 0,05$, maka penelitian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD. Ini berarti bahwa anggota dewan meyakini bahwa dengan meningkatnya partisipasi

masyarakat maka pengawasannya terhadap APBD juga akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suresh Shende and Tony Bennet (2004) yang menemukan telah banyak laporan untuk memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat adalah atribut dari struktur dan proses finansial seluruh sektor publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dan didukung dengan teori serta pembahasan pada bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD; Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD; Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, dan partisipasi masyarakat serta interaksinya secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

Saran

Sehubungan masih agak rendahnya pengetahuan anggota dewan tentang anggaran yang ditemukan penelitian ini, diharapkan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari anggota dewan khususnya yang tergabung dalam komisi yang membidangi keuangan dan Panitia anggaran untuk meningkatkan pengetahuannya, yang pada gilirannya diharapkan berdampak terhadap *actionnya* dalam rangka pengawasan terhadap APBD, sehingga diharapkan penyimpangan dana APBD menjadi berkurang.

Organisasi partai politik harus memperhatikan kualitas dan kapabilitas kadernya termasuk pengetahuan tentang anggaran, pemahaman pentingnya partisipasi masyarakat dalam memutuskan kader mana yang akan dimajukan menjadi calon legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

Agus H Pramono, 2002, Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam

Yuliusman.: Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran dengan Pengawasan APBD

- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- BPK. 2004. Laporan Hasil Pemeriksaan . BPK- Perwakilan Jambi
- Yudono, B. 2002. Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, [ttp://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm](http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm).
- Witono, B.2003. Optimalisasi peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, vol.2 : 151-168
- Ghozali, I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Andriani, R. 2002. Pengetahuan dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Shende.S and B. Tony,2004. Transparency and Accountability in Public Financial Administration.(Concept Paper 2).UN DESA DPDM, United Nations
- Sopannah, M. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan transparansi kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. SNA VI Surabaya, oktober 2003, p1160.
- Sri Murni dan B. Witono.2003. Pengaruh Personal Background dan Political Background terhadap Peran DPRD dalam pengawasan Keuangan Daerah, Perspektif, Vol.9.
- Werimon, S., I. Ghozali dan M.Nazir. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), SNA X, Makasar

